

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S, I. E., & Tarantang, J. (2019). *Arbitrase (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Ali, C. (2015). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Atmadipraja, S. (1990). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Djatnika.
- Borahima, A. (2010). *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*. Jakarta: Kencana.
- Briliawan Gama Rahmatullah, d. (2020). *Antologi Esai Hukum dan HAM : Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dahlan Thaib, d. (2003). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dewi, S. (2015). *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika.
- Djafar, W. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data Pascasarjana UGM*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Djafar, W., & Santoso, M. J. (2019). *Perlindungan Data Pribadi : Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. Jakarta: Penerbit ELSAM.

- Djafar, W., & Santoso, M. J. (2019). *Perlindungan Data Pribadi : Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*. Jakarta: Penerbit ELSAM.
- Fahey, E. (2018). *Institutionalisation Beyond the Nation State : Transatlantic Relations : Data, Privacy and Trade Law (Studies in European Economic Law and Regulation) First Edition*. Springer.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary Ninth Edition*. St. Paul: West.
- HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Huda, N. (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, C., & Kansil, C. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Rajagrafindo Persada.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kristanti, C. T. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Machmud, S. (2008). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Makarim, E. (2004). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyati, N. R. (2013). *Urgensi Pasangan Suami Isteri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu)*. Riau: UIN Syarif Kasim.
- Munir, N. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Mustafa, B. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nadia, S. (2020). Mengembalikan Humanisme Perlindungan Data Pribadi melalui Perluasan Yurisdiksi Ekstrateritorial sebagai Upaya Diplomasi dalam Mewujudkan Keamanan Siber. In d. Briliawan Gama Rahmatullah, *Antologi Esai Hukum dan HAM : Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia* (p. 57). Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diapit Media.
- Naufal, R. A. (2020). *Tanggung Jawab PT. Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna*. Yogyakarta: FH UII.
- Novianty, E. (2011). *Analisa Ekonomi dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*. Depok: Pascasarjana FH UI.
- Oka, S. I. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, A. L. (2016). Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Seminar Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (p. 215). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prasetyo, T., & Karo-Karo, R. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Prints, D. (2002). *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purwanto. (2007). *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rosadi, S. (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Refika Aditama.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Genesis.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Genesis.
- Simanjuntak, P. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Subakti, A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia yang Berlandaskan Nilai Pancasila. *Jurnal Nestor Vol. 9, No. 1*, 8.
- Subekti, R., & Tjitrisudibjo, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudibyoy, A. (2019). *Jagad Digital : Pembebasan dan Penguasaan*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Suharnoko. (2012). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sunarto. (2014). *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syamsuddin, M. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Widyastuti, S. M. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Winata, F. H. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Alihodzic, S. (2016). Manajemen Resiko dalam Pemilu. *Makalah Kebijakan No. 14*, 7.
- Angriani, P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce : Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Diktum : Syariah dan Hukum Vol. 19, No. 2*, 154.
- Bachtiar, & Sumarna, T. (2018). Pembebanan Tanggung Jawab Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi oleh Kepala Dinas Kajian Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Tng. *Jurnal Yudisial No. 2 Vol. 11*, 217.
- Bagus Oktafian Abrianto, d. (2020). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *Jurnal Negara Hukum Vol. 11 No. 1*, 50.
- Bennett, T. D. (2019). Triangulating Intrusion in Privacy Law. *Oxford Journal of Legal Studies Vol. 39, No. 2*, 756.

- Butarbutar, E. N. (2018). Asas Nebis In Idem dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Yudisial Vol. 11, No. 1*, 36.
- Clara Yunita Ina Ola, d. (2017). Tanggung Jawab Pidana, Perdata, dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality Vol. 25, No. 2*, 140-141.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal An-Nisbah Vol. 03, No. 02*, 279.
- Gandomi, A., & Haider, M. (2015). Beyond The Hype : Big Data Concepts, Methods, and Analytics. *International Journal of Information Management*, 138.
- Gatiningsih. (2015). Identifikasi Data Base Kependudukan Sebagai Produk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dukcapil No. 2, Vol. 3*, 122.
- Hanifah, M. (2015). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 2, No. 1*, 3.
- Hasan, M., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM Vol. 11 No. 2*, 286.
- Indriyani, d. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System. *Jurnal Justitia Vol. 1 No. 2*, 192 - 193.
- Irawati, A. C. (2019). Penerapan Gugatan Class Action Guna Mencapai Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Lingkungan Hidup). *Jurnal Qistie Vol. 11 No. 2*, 169.
- Islamiati, S. D. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Marketplace Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Mataram: FH Universitas Mataram.
- Kall, J. (2020). The Materiality of Data as Property. *Harvard International Law Journal Frontiers Vol. 61*, 9.
- Linggis Galih Wiseso, d. (2020). Analisis Performa Neo4j, Mongoddb, dan Postgresql Sebagai Database Manajemen Big Data Pemilu 2019. *Jurnal eProceedings of Engineering Vol. 7, No. 3*, 9694.
- Mahira, d. (2019). Consumer Protection System (CPS) : Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept. *Jurnal Becoss Vol. 1 No. 1*, 147 - 154.
- Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Lembaga Independen Negara dan Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Definisi : Agama dan Sosial Humaniora Vol. 1, No. 2*, 79.

- Mantili, R., & Sutanto. (2019). Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Dialogia Iuridica Vol. 10, No. 2, 7*.
- Nababan, R., & Sinaga, N. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Data Pribadinya Diperjual Belikan di Aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Vol. 02, No. 02, 160*.
- Nazriyah, R. (2011). Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum : Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011. *Jurnal Hukum Vol. 18 Edisi Khusus, 119*.
- Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Surya Kencana Dua Vol. 7, No. 1, 85*.
- Nifari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Data Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain). *Jurnal Yuridis Vol. 7, No. 1, 107*.
- Panjaitan, H. (2018). Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia. *Jurnal Hukum TORA Vol. 4, No. 1, 32*.
- Poesoko, H. (2015). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Adhaper Vol. 1, No. 2, 236*.
- Rivo Krisna, d. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta No. 568/1986.G). *Diponegoro Law Journal Vol. 6, No. 2, 11*.
- Rizza, C., & Pereira, A. G. (2011). Interrogating Privacy in the Digital Society : Media Narratives After 2 Cases. *Journal of Information Ethics, 9*.
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM No. 2 Vol. 11, 286*.
- Sharaningtyas, Y. N. (2016). Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. *Jurnal Kertha Patrika Vol. 38 No. 1, 38*.
- Situmeang, S. M. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna dalam Perspektif Hukum Siber. *Jurnal SASI Vol. 27 No. 1, 39*.

- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica Vol. 10, No. 2, 7*.
- Sodikin. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi. *Jurnal Al-Qisth Law Review Vol. 5, No. 2, 275*.
- Soediro. (2018). Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18, No. 2, 103*.
- Supenawinata, A. (2008). Perkembangan Jiwa Nabi Muhammad. *Jurnal Psymphatic Vol. 1, No. 1, 91*.

Data Elektronik

- (n.d.). Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/uu-perlindungan-data-pribadi-berlaku-kapan-lembaga-pengawas-dibentuk>
- (n.d.). Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>.
- Aini, R. Q. (n.d.). *Peranan Big Data dalam Pemilu Indonesia*. Retrieved from http://idea.warta17agustus.com/id/eprint/734/1/Rossi%20Qurratul%20Aini_Peranan%20Big%20Data%20Dalam%20Pemilu%20Indonesia.pdf
- Finaka, A. W. (n.d.). *Jangan Sembarang Sebar NIK Ya!* Retrieved from Indonesia Baik: <https://indonesiabaik.id/infografis/jangan-sembarangan-sebar-nik-ya>
- Imperva. (n.d.). *Data Breach*. Retrieved from Imperva.com: <https://www.imperva.com/learn/data-security/data-breach/>
- Secha, K. N. (2022, September 12). *Heboh Bjorka, KPU Tingkatkan Keamanan Siber Cegah Kebocoran Data*. Retrieved from Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-6286885/heboh-bjorka-kpu-tingkatkan-keamanan-siber-cegah-kebocoran-data>
- Shahnaz, K. (2022, September 09). *Data Pemilih Bocor, CISSReC : KPU Harus Berikan Penjelasan!* Retrieved from Bisnis.com: <https://teknologi.bisnis.com/read/20220909/84/1575857/data-pemilih-bocor-cissrec-kpu-harus-berikan-penjelasan>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan